BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan program perbaikan jalan merupakan bagian dari pembangunan. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting keberadaannya di Kota Bandung. Keberadaan jalan menghubungkan wilayah yang ada di Kota Bandung beberapa diantaranya mempunyai aktifitas yang cukup tinggi dan jalan sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitasnya setiap hari. Jumlah masyarakat yang banyak mempunyai kendaraan dan dapat menimbulkan kepadatan di jalan raya, maka keadaan fisik jalan sangatlah penting. Berdasarkan pengertian diatas adalah faktor pendukung kelancaran aktifitas masyarakat yang dilakukan setiap harinya.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki tugas untuk pembangunan terhadap sarana dan prasarana untuk masyarakat yang selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara pembangunan negara.

Keberhasilan pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi

dan keberhasilan dibidang ekonomi. Tujuan dan sasaran pembangunan yaitu masyarakat adil dan makmur, perlu diusahakan adanya keserasian dan keselarasan dalam pemakaian Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta permodalan dan teknologi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berarti fungsi pembangunan pun telah di desentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan paradigma di atas menuntut pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Mengurus rumah tangga daerah dan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat, kinerja pemerintah daerah melalui kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditingkatkan. Pengelolaan sumber daya manusia terkait dan mempengaruhi kinerja instansi pemerintahan dengan cara menciptakan nilai atau menggunakan keahlian sumber daya manusia yang berkaitan dengan praktek manajemen dan sasarannya cukup luas, tidak hanya terbatas aparatur pemerintah saja semata, namun juga meliputi tingkatan pemimpin.

Jalan raya memiliki empat kelompok kepemilikan penerima dampak pembangunan jalan raya, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta masyarakat setempat. Pertimbangan utama

diberikan pada dampak yang diterima oleh masyarakat setempat dan kemudian kepada pemerintah daerah sebagai lembaga yang langsung berhubungan dengan kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan lalu lintas jalan raya.

Jalan raya merupakan sarana transportasi darat yang membentuk jaringan transportasi untuk menghubungkan daerah-daerah, sehingga roda perekonomian dan pembangunan dapat berputar dengan baik. Seiring dengan bertambahnya kepemilikan kendaraan menyebabkan meningkatnya volume lalu lintas, sementara kapasitas jalan tetap. Hal ini akan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Jalan besar ini mempunyai ciri-ciri digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum dan dibiayai oleh perusahaan negara.

Jalan raya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat karena menolong orang untuk pergi atau mengirim barang lebih cepat ke suatu tujuan. Adanya jalan raya, komoditi dapat mengalir ke pasar setempat dan hasil ekonomi dari suatu tempat dapat dijual kepada pasaran di luar wilayah itu. Selain itu, jalan raya juga mengembangkan ekonomi lalu lintas di sepanjang lintasannya. Lintasan jalan raya yang menghubungkan bandar-bandar besar, penduduk setempat dapat menjual makanan kepada sopir truk yang sering lewat di situ. Tujuan pembangunan jalan raya pada umumnya dimaksudkan sebagai prasarana diantaranya agar kendaraan angkutan dapat mengangkut penumpang atau barang langsung ke tempat tujuan dan kota-kota yang dilalui atau yang dituju serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang dapat mengurang.

Kemacetan lalu lintas yang timbul akibat jalan rusak ini dapat berakibat terhadap kenaikan biaya angkutan dan biaya perjalanan akan semakin meningkat bahkan juga akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan pencemaran udara yang mana hal ini akan mengganggu kesehatan masyarakat, dengan turunnya tingkat kesehatan masyarakat maka hal ini juga akan dapat berakibat menurunkan produktivitas kerja masyarakat, sedangkan dampak positif dari pembangunan jalan raya ini adalah membantu melancarkan kegiatan distribusi ekonomi seperti di bidang industri dan perdagangan yang mengarah ke arah yang lebih luas lagi. Jalan raya bukanlah barang atau fasilitas yang dimiliki oleh perorangan atau bersifat pribadi tetapi statusnya adalah sebagai barang publik yang mana dapat dikonsumsi oleh orang banyak.

Pembangunan jalan lewat pinggiran kota akan lebih menguntungkan dalam arti lebih cepat dan lancar lalu lintasnya, mengembangkan wilayah dan tidak menciptakan kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara. Sedangkan pembangunan jalan lewat kota akan dapat menciptakan pertumbuhan industri dan perdagangan dengan lebih cepat, tetapi banyak menimbulkan banyak kemacetan lalu lintas dan pencemaran udara.

Aparatur yang berkualitas merupakan aparatur yang memiliki kecakapan dan kemampuan, yang sangat dibutuhkan dalam rangka menghadapi tantangan tersebut. Kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Hal lainnya adalah mampu memelihara dan mengembangkan kecakapan dan kemampuannya secara berkesinambungan. Tugas pimpinan pada setiap organisasi

pemerintahan untuk memelihara dan membina semua aparatur agar dapat lebih berkualitas dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah direncanakan.

Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah Kota Bandung yang merupakan organisasi pemerintah dan berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana jalan serta pengairan, melaksanakan tugas teknis operasional di bidang sarana dan prasarana jalan serta pengairan, serta melaksanakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan dinas. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung yang bergerak dalam penyediaan prasarana infrastruktur pendukung perekonomian dan kehidupan masyarakat. Infrastruktur diantaranya jalan dan *drainase*, sesuai dengan visi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu "Terwujudnya Pemenuhan Infrastruktur Jalan Guna Dan Sumber Daya Air Guna Mendukung Terciptanya Kesejahteraan Masyarakat".

Salah satu pekerjaan perbaikan jalan yang dikerjalakan oleh aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah unit reaksi cepat perbaikan jalan di Kota Bandung. Namun di dalam pelaksanaanya Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tidak serta merta dapat memberikan kepuasan yang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, banyaknya perbaikan jalan yang tidak bisa terpenuhi dengan baik merupakan suatu bukti bahwa masih kurangnya kinerja aparatur yang

baik oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung dalam memberikan pelayanan fisik kepada masyarakat Kota Bandung.

Kota Bandung berada di tengah-tengah daerah Kabupatan Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi, sehingga dengan pergerakan ekonomi yang sangat tinggi di Kota Bandung jumlah *volume* pengendara bertambah pada pagi hingga malam hari. Oleh karena itu munculah dampak permasalahan kota pada umumnya yaitu dengan banyaknya jalanan Kota Bandung yang rusak dan tidak memenuhi standar kualitas jalan.

Melihat kondisi yang demikian, seringkali muncul persepsi kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi sebagian besar masyarakat menginginkan jalan raya dapat dipergunakan dengan baik tanpa adanya kerusakan jalan yang menghambat perjalanan. Sementara pada sisi yang lain, pemerintah dan dinas terkait berupaya memperbaiki jalan yang mengalami kerusakan, akan tetapi banyak permasalahan sehingga jalan mulus yang diharapkan oleh masyarakat pemerintah belum sepenuhnya memberikan pelayan fisik yang baik untuk warganya.

Permasalahan mengenai kinerja aparatur yang diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mengenai perbaikan jalan perlu ditindak lanjuti, oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung membuat unit reaksi cepat perbaikan jalan. Panjangnya ruas jalan di Kota Bandung, anggaran yang dikeluarkan untuk membeli aspal dan kinerja aparatur yang belum memuaskan masih menjadi permasalahan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

Sumber yang peneliti dapat dari akun twitter Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung jalan di Kota Bandung tidak semua jalan dapat diperbaiki karena ada tiga kepemilikan jalan yaitu milik Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Hal tersebut menjadi kendala unit reaksi cepat tambal jalan rusak di Kota Bandung dikarenakan masyarakat yang melapor perbaikan jalan rusak belum mengetahuinya tiga kepemilikan jalan di Kota Bandung.

Seperti contoh ruas kepemilikan jalan di berikut ini:

Gambar 1.1
Jalan Nasional

PANJANG JALAN DI KOTA BANDUNG
MENURUT WEWENANG
SESUAI S.K. MENTERI PEKERJAAN UMUM
No. 631/KPTS/M/2009

JALAN NASIONAL

No.	RUAS	PANJANG (Km.)
1	Jl. Soekarno Hatta	18.350
2	Jl. Rajawali Barat	0.970
3	Jl. Nurtanio	1.200
4	Jl. Jendral Sudirman	1.230
5	Jl. Raya Cibeureum	2.800
6	Jl. Abdul Rahman Saleh	1.040
7	Jl. Pajajaran	1.060
8	Jl. H.O.S. Tjokroaminoto (Pasirkaliki)	0.710
9	Jl. Layang Pasupati (Gasibu-Cipedes)	1.800
10	Jl. Pasteur	0.770
11	Jl. Surapati	1.800
12	Jl. KHP Hasan Mustopa/Suci	2.372
13	Jl. Raya Sindanglaya	4.185
14	Jl. Raya Ujung Berung	2.880
15	Jl. Raya Cipadung	1.450
16	Jl. Cibiru	0.550
17	Jl. Gedebage	0.458
Jumlah		**43.625**

Total Panjang Jalan di Kota Bandung	1236.480
Panjang Jalan Kota	1160.800
Panjang Jalan Nasional	43.625
Panjang Jalan Provinsi	32.054

Sumber: (www.twittter/@dbmpkotabdg, 21/04/2015)

Gambar di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa daftar ruas jalan milik Pemerintah Pusat yang berada di Kota Bandung.

Gambar 1.2
Jalan Provinsi

JALAN PROVINSI
Kepgub Jawa Barat No. 620/Kep1530 Admrek/2011

No.	RUAS	PANJANG (Km.)
1	Jl. Terusan Buah Batu	0.990
2	Jl. Terusan Buah Batu 1	1.270
3	Jl. Cicendo	0.425
4	Jl. Kebon Kawung	0.639
5	Jl. Pajajaran	1.000
	Jl. Pajajaran	0.650
6	Jl. Pasirkaliki/ H.O.S Tjokroaminoto	0.340
	Jl. Pasirkaliki/ H.O.S Tjokroaminoto	0.420
7	Jl. Terusan Pasir Koja	2.652
8	Jl. Peta	2.457
9	Jl. BKR	2.187
10	Jl. Pelajar Pejuang 45	1.560
11	Jl. Laswi	1.171
12	Jl. Ahmad Yani	0.535
13	Jl. W.R. Supratman	1.676
14	Jl. P.Diponegoro	1.369
15	Jl. Cilamaya	0.240
16	Jl. Cimandiri	0.345
17	Jl. Depan LAN	0.125
18	Jl. Cilaki	0.200
19	Jl. Aria Jipang	0.216
20	Jl. Gasibu Barat	0.205
21	Jl. Sentot Alibasyah	0.202
22	Jl. Kopo	2.000
23	Jl. Moh. Toha	1.490
24	Jl. Sukajadi	2.530
25	Jl. Setiabudhi	4.980
26	Jl. Sukawangi	0.180
Jumlah		**32.054**

Sumber: (www.twittter/@dbmpkotabdg, 21/04/2015)

Gambar di atas menjelaskan bahwa terdapat beberapa daftar ruas jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada di Kota Bandung.

Gambar 1.3
Jalan Bolong, Ridwan Kamil : Tak Semua Jalan Milik Pemkot Bandung



BANDUNG,(PRFM)- Keluhan warga terkait jalan bolong maupun aspalnya menggerus setiap hari bisa diperdengarkan di PRFM. Mereka pun meminta agar pemerintah Kota Bandung agar melakukan gerak cepat penambalan sementara lewat unit reaksi cepat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung. Akan tetapi, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, tak semua jalan milik Pemerintah

Kota Bandung."Saya pun baru memahami bahwa yang namanya di Indonesia ini ada properti milik pemkot, pemprov dan nasional. Nah, itupun berlaku untuk jalan," katanya, Senin (23/2/2015). Jadi, kata Emil panggilan akrabnya, perbaikan jalan tak sesederhana yang dipikirkan oleh warga begitupun dirinya."Pernah kami tambal malah dipermasalahkan secara administrasi bahwa tak boleh menambal jalan di lahan milik orang lain. Karena uang Pemkot tak boleh tambal jalan Pemprov," katanya. Sementara itu, Emil mengerti warga tak mengetahui kepemilikan jalan yang dikeluhkannya. Jadi, ia mengungkapkan dipusingkan oleh sebuah sistem yang kurang tepat sehingga hanya bisa melaporkan secara cepat ke Dinas PU Pemprov Jabar untuk melaksanakan penambalan. "Hati kecil ingin melakukan penambalan tapi di lain pihak tak bisa," tuturnya. Sumber: (http://www.prfmnews.com, 24/02/2015)

Berdasarkan berita di atas memberitakan bahwa tidak semua ruas jalan di Kota Bandung milik Pemerintah Kota Bandung. Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugasnya hanya memperbaiki jalan milik Pemerintah Kota Bandung. Banyak masyarakat yang mengeluhkan perbaikan dan pengerjaan jalan di Kota Bandung, tetapi jalan tersebut kepemilikannya bukan dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Seharusnya pemerintah Kota Bandung berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementrian Pekerjaan Umum terkait perbaikan jalan di Kota Bandung.

Namun pada kenyataannya, keadaan fisik jalan di Kota Bandung masih jauh dari sempurna banyak jalan yang berlubang, dengan kata lain belum layak untuk digunakan dalam aktifitas sehari-hari. Banyak masyarakat meminta untuk segera memperbaiki kerusakan jalan yang ada. Seperti contoh kasus di bawah ini:

Gambar 1.4
Jalan Rusak dan Berlobang, URC Segera Meluncur



Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung berjanji segera melakukan perbaikan jalan yang rusak di Kota Bandung, sedangkan bila ada jalan yang berlobang segera laporkan kepada pihak unit pelaksana teknis daerah (UPTD) disetiap wilayah yang telah memiliki tim reaksi cepat penambalan jalan. "Setiap UPTD telah memiliki tim unit reaksi cepat (URC) dan segera meluncur ke lokasi bila ada jalan yang berlobang dan rusak untuk memperbaikinya. Namun, kepedulian warga masyarakat juga sangat dibutuhkan bila benar ada laporan tim segera meluncur ke lokasi," kata Kepala DBMP Kota Bandung melalui Kepala Bidang Monitoring dan Pengendalian DBMP Kota Bandung, T. Setiadi,M.Si saat dikonfirmasi "galamedianews.com" di ruang kerjanya Kantor DBMP Kota Bandung jalan Cianjur Bandung, Jum'at (13/2). Menurut Setiadi, setiap wilayah telah memiliki tim unit reaksi cepat penambalan jalan terutama bila ada jalan yang berlobang tim langsung turun ke lapangan. "Unit reaksi cepat tambal jalan langsung meluncur bila ada informasi dari masyarakat atau pengaduan, karenanya kepedulian warga masyarakat harus terus dan menjalin kordinasi," kata Setiadi. Disisi lain, lanjut Setiadi, hampir setiap hari tim URC tambal jalan di 6 (enam) wilayah melakukan pengerjaan dalam bentuk penambalan jalan. Sedangkan, untuk perbaikan jalan dengan memerlukan anggaran yang cukup besar tentunya harus melalui mekanisme dan aturan. Masih menurut Setiadi, pihaknya mendapat laporan dari setiap wilayah ada yang per bulan dan per triwulan. Sebagai contoh data laporan terakhir Januari 2015 yang telah masuk dari wilayah Bojonagara dan Tegalega. Adapun, pekerjaan penambalan jalan yang telah dilakukan di wilayah Bojonagara yakni jalan Jln junujunan sepanjang 400 meter persegi, jalan Kebon Jati (150m2), Jln. Dr. SutamI (470 m), Jln. Sindang Sirna (250m), jalan Bungur (350m) dan jalan Cemara sepanjang 375 meter. Sumber: (http://www.m.galamedianews.com, 13/02/2015)

Berdasarkan berita di atas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung berjanji segera memperbaiki jalan yang rusak, akan tetapi sesuai dengan permasalahan yang peneliti bahas perbaikan jalan yang sudah dikerjakan jalan tersebut tidak bertahan lama dan mengalami kerusakan kembali.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai kinerja aparatur.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan Yustika (2011) dimana melalukan penelitian yang berjudul kinerja aparatur Dinas Kesehatan dalam menerapkan sistem informasi rumah sakit di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan dalam upaya mengembangkan pemerintah yang berbasis digital, pemerintah online, sebagai wujud dari penerapan E-Government Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat membangun SIRS yang berfungsi sebagai sistem pelaporan rumah sakit dan informasi kesehatan di Provinsi Jawa Barat yang berguna bagi aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Kinerja aparatur Dinas Kesehatan dalam menerapkan SIRS di Provinsi Jawa Barat pada Bagian Data dan Informasi Kesehatan belum adanya SDM yang handal dan berkualitas secara merata dalam menerapkan SIRS.br / Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kinerja dari Keith Davis yang mengatakan ada dua faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu faktor kemampuan (ability) dan motivasi (motivation).

Penelitian mengenai jalan juga dilakukan oleh Rismayanto (2007) dimana melalukan penelitian yang berjudul pengaruh daktilitas aspal terhadap kekuatan lapisan permukaaan jalan. Penelitian ini mempelajari tentang pengaruh daktilitas membuka ke permukaan mantel kekuatan jalan. Digunakan aspal terdiri dari penetrasi aspal 40-60, 60-70, 85-100. maka hasil diperoleh dari penelitian membuktikan bahwa aspal yang penetrasi 60-70 yang terbaik.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya dan juga sesuai dengan masalah yang dikemukan penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan sama-sama membahas kinerja aparatur dan jalan, akan tetapi di beberapa penelitian sebelumnya penelitian kinerja aparatur dan jalan dilihat dan di evaluasi dari segi sumber daya manusia pada kinerja aparatur dan kualitas jalan. Penelitian yang akan saya lakukan yaitu kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (studi kasus perbaikan jalan milik pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees), dalam pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan tujuan terbentuknya program tersebut atau kinerja aparatur masih belum baik.

Salah satu contohnya adalah kinerja aparatur unit reaksi cepat perbaikan jalan di Kota Bandung. Pada kasus ini terlihat bahwa adanya beberapa kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat dalam pekerjaan perbaikan jalan yang diberikan oleh unit reaksi cepat. Pada kenyataanya banyak kerusakan di titik-titik jalan raya Kota Bandung yang sudah diperbaiki oleh unit reaksi cepat perbaikan jalan Dinas Bina Marga da Pengairan Kota Bandung, akan tetapi dalam waktu dekat jalan tersebut

mengalami kerusakan kembali, hal ini terlihat dari beberapa jalan yang sudah diperbaiki mengalami kerusakan. Masalah lain juga yang sering dirasakan oleh masyarakat yaitu kualitas jalan yang tidak sesuai dengan prosedur membuat jalan tersebut sehingga jalan yang sudah diperbaiki mengalami kerusakan yang sangat cepat.

Masalah yang diambil peneliti dari judul kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (studi kasus perbaikan jalan milik pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees) adalah banyaknya program perbaikan jalan yang sudah dikerjakan tetapi jalan tersebut sudah mengalami kerusakan dan tidak bertahan lama. Dari kasus ini dapat di lihat bahwa Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung belum maksimal dalam memberikan kinerjanya kepada masyarakat.

Berdasarkan fakta-fakta yang terdapat pada tulisan di atas jalan yang rusak sudah mendapat perhatian untuk diperbaiki tapi jalan yang sudah diperbaiki tersebut mengalami kerusakan kembali. Kinerja aparatur unit reaksi cepat Dinas Bina Marga dan Pengairan pun dipertanyakan, apakah sebenarnya Dinas Bina Marga dan Pengairan menggunakan anggaran secara efektif atau tidak yang mengakibatkan perbaikan jalan mudah mengalami kerusakan kembali.

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan penelitian ini adalah perbaikan jalan yang dikerjakan dengan baik oleh Dinas Bina marga dan Pengairan Kota Bandung, akan tetapi jalan yang sudah diperbaiki masih mengalami kerusakan. Dampak dari kurang baiknya kinerja aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung adalah banyaknya program perbaikan jalan yang rusak tidak dibarengi

dengan kualitas jalan yang sesuai dengan prosedur. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Kinerja Aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung (Studi Kasus Perbaikan Jalan Milik Pemerintah Kota Bandung Oleh Unit Reaksi Cepat Karees)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memperjelas fokus masalah penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana produktivitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ?
2. Bagaimana kualitas layanan aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ?
3. Bagaimana responsivitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ?
4. Bagaimana responsibilitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ?
5. Bagaimana akuntabilitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kinerja aparatur Unit Reaksi Cepat Perbaikan Jalan Milik Pemerintah Kota Bandung oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1) Untuk menganalisa produktifitas kinerja aparatur Dinas Bina Maga dan Pengairan Kota Bandung tentang pelaksanaan program perbaikan jalan milik Pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees.
2) Untuk menganalisa kualitas layanan aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tentang pelaksanaan program perbaikan jalan milik Pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees.
3) Untuk menganalisa responsivitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tentang pelaksanaan program perbaikan jalan milik Pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees.
4) Untuk menganalisa responsibilitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tentang pelaksanaan program perbaikan jalan milik Pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees.
5) Untuk menganalisa akuntabilitas aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tentang pelaksanaan program perbaikan jalan milik Pemerintah Kota Bandung oleh unit reaksi cepat karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Bagi Peneliti

   Kegunaan penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk melatih kemandirian sikap dan rasa tanggung jawab dalam meneliti suatu masalah. Selain itu juga sebagai gambaran praktis bagi peneliti berkaitan dengan kerusakan jalan di Kota Bandung, serta peneliti pun dapat mengetahui kinarja aparatur dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung mengenai unit reaksi cepat perbaikan jalan milik Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung.

2. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teoritis tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khususnya Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan *literature* bagi penelitian-penelitian serupa selanjutnya.

3. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung maupun aparatur Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam

memperbaiki kinerja aparatur unit reaksi cepat perbaikan jalan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.